



**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN  
BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) DI DESA GOGIK  
KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial

Oleh

Prio Tri Isyanto

NIM. 3312413032

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**2017**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial pada:


Hari :

Tanggal :

Disetujui oleh:

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II



Drs. Tijan, M.Si

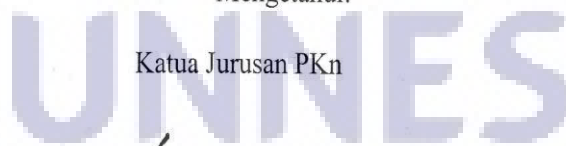
Martien Herna Susanti S.Sos, MSi

NIP: 196211201987021001

NIP:197303312005012001

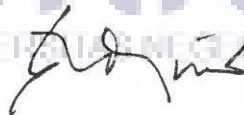
Mengetahui:

Katua Jurusan PKn



UNNES

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



Drs. Tijan, M.Si

NIP: 196211201987021001

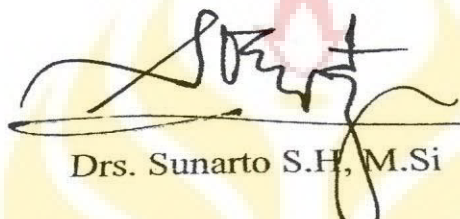
## PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang panitia ujian skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari :

Tanggal :

Penguji I

  
Drs. Sunarto S.H., M.Si  
NIP:196306121986011002 ✓

Penguji II



Drs. Tijan, M.Si

NIP:196211201987021001

Penguji III



Martien Herna Susanti S.Sos, Msi

NIP:197303312005012001

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Mengetahui :



Prof. Dr. Rustono, M.Hum.

NIP. 195801271983031003

## PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi atau tugas akhir ini sungguh hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.



Semarang, Agustus 2017

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Prio Tri Isyanto', is written over the logo area.

Prio Tri Isyanto

NIM. 3312413032

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO:

- *Barang siapa yang bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah untuk dirinya sendiri. (Q.S Al- 'Ankabut 6)*
- *Satu-satunya hal yang harus kita takuti adalah ketakutan itu sendiri. (Franklin D.Roosevelt)*

### PERSEMBAHAN:

Bismillahirohmanirrohim, dengan menghaturkan puji syukur kehadiran Allah SWT, saya persembahkan karya ini teruntuk:

1. Bapak Kamsiran dan Ibu Sunipah yang telah memberikan kasih sayang, semangat, dan motivasi yang tulus serta curahan doa sampai kesuksesan yang ada didepan mata.
2. Kakak ku tercinta Ekowati, dan Jumarti yang selalu memberikan semangat dan mendukungku dan Keponakan lucu Marsha Mariana Putri dan Naura Angelika Putri yang setia menjadi teman ribut terhangat yang mengusir kesepian suasana rumah.
3. Kedua Nenek ku yang selalu mendoakan dan mendukungku.
4. Bapak Kyai Ahmad Fadhil Sekeluarga yang selalu memberikan nasehat, membimbingku beserta curahan doa yang selalu menyertai disetiap langkahku.
5. Anik Setyowati wanita terhebatku yang selalu memberikan semangat motivasi agar aku tidak mudah menyerah dalam setiap hal.

6. Sahabat ku Jumal, Atho, Bima, Zaki, Surur, Ika yang selalu mendukungku.
7. Teman-teman seperjuanganku Alumni Madrasah Aliyah Sunan Prawoto yang menjadi keluarga kedua di Kota Semarang.
8. Guru-guru Madrasah Aliyah Sunan Prawoto terutama Pak Anif, Pak Hahirin, Bu Muna, Pak afif yang selalu memberikan aku semangat dan motivasi untuk selalu berani menghadapi keadaan.
9. Teman-teman Prodi Ilmu politik angkatan 2013 terutama Wihaw, Agam, Mamad, Joko, Iwan, Anton, Faiz, Mahdi, Dion, Putri Wahyu, dan Eri yang selalu memberikan dukungannya.
10. Almamater ku Universitas Negeri Semarang yang saya banggakan.



## PRAKATA

Assalamualaikum, Wr. Wb

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul: “Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang”.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) Ilmu Politik pada Jurusan Politik dan Kewarganegaraan di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Penyusunan Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M. Hum., selaku Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Prof. Dr. Rustono M. Hum., selaku Plh. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
3. Drs. Tijan, M. Si., selaku Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan dan Dosen Pembimbing I yang dengan sabar membimbing, mengarahkan, menasehati, dan memotivasi dalam penulisan skripsi.
4. Martien Herna Susanti, S. Sos., M.Si., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan nasihat, wejangan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini serta sabar dalam membimbing skripsi.

5. Drs. Sunarto, S. H, M. Si., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan, pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi.
6. Seluruh Perangkat Desa Gogik, Pegurus BUM Desa Rejo Mulyo Desa Gogik, Unit Pengelola Lembaga Keuangan Desa, Unit Pengelola Pemanfaatan Air Bersih, Unit Pengelola Wisata Curug Semirang serta seluruh pihak yang terkait dalam pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan BUM Desa yang telah meluangkan waktu dan membantu memberikan data dalam penelitian.
7. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memotivasi dan membantu sehingga penulisan skripsi dapat diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah khasanah keilmuan bagi penulis sendiri dan bagi pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, .....

Penyusun



## SARI

**Isyanto, Prio Tri.** 2017. *Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang*, Skripsi. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Drs. Tijan, M.Si, dan Martien Herna Susanti, S.Sos., M. Si. 166 halaman .

Kata kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Pengembangan, BUM Desa

Problem pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan BUM Desa harus diatasi. Pihak-pihak yang terkait dalam pemberdayaan harus mampu memberikan daya dan dorongan kepada masyarakat agar mampu meningkatkan keterampilan dan kreativitas masyarakat dalam pengembangan kegiatan ekonomi. BUM Desa merupakan wadah kegiatan ekonomi masyarakat. BUM Desa Gogik harus mampu mandiri sesuai dengan prinsip pengelolaan BUM Desa. BUM Desa Gogik diharapkan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Tujuan penelitian ini mengetahui pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pihak-pihak terkait melalui Pengembangan BUM Desa di Desa Gogik.

Fokus penelitian ini adalah Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pihak-pihak terkait melalui Pengembangan BUM Desa. Metode pengumpulan data yang digunakan berupa: metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tehnik analisis data menggunakan analisis data interaktif yang berlangsung terus menerus sampai tuntas hingga datanya jenuh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pihak-pihak terkait melalui Pengembangan BUM Desa. 1) pemberdayaan masyarakat melalui LKD dilakukan dengan pelatihan kewirausahaan dan pemberian modal kepada masyarakat 2) Pemberdayaan masyarakat melalui PAB dilakukan dengan kegiatan Mud Banyu dan kegiatan sosial pemuda RT Desa Gogik 3) pemberdayaan masyarakat melalui Wisata Curug Semarang dilakukan dengan penanaman pohon, kegiatan bersih wisata dan melengkapi sarana dan prasarana wisata. Model pemberdayaan belum dapat dilakukan secara maksimal, tahap monitoring dan evaluasi belum dapat dijalankan dengan baik. Pengembangan BUM Desa dilakukan dengan prinsip pengelolaan BUM Desa dengan membangun kerja sama, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainabel.

Faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan BUM Desa. Faktor pendukung pemberdayaan masyarakat (1) semangat juang yang tinggi oleh pihak-pihak terkait dalam melakukan pemberdayaan, dan (2) kualitas SDM yang memadai. Faktor penghambat pemberdayaan masyarakat (1) kurangnya kesadaran dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengembangkan BUM Desa, dan (2) sarana dan prasarana BUM Desa yang kurang memadai.

Saran, perlu adanya peningkatan program-program pemberdayaan masyarakat dengan melihat permasalahan dan kebutuhan dalam masyarakat secara mendalam. Mengadakan pendampingan dan evaluasi secara rutin dalam rangka pemberdayaan masyarakat.



## ABSTRACT

**Isyanto, Prio Tri.** 2017. Community Empowerment through the development of Village Owned Enterprises (Village BUM) in Gogik Village District West Ungaran Semarang District, Thesis. Department of Politics and Citizenship, Faculty of Social Sciences Semarang State University. Drs. Tijan, M. Si, and Martien Herna Susanti, S.Sos., M. Si. 166 pages.

Keywords: Community Empowerment, development, BUM Desa

Problems of community empowerment through developing BUM Desa must be overcome. The parties involved in empowerment should be able to provide power and encouragement to the community in order to improve the skills and creativity of the community in the development of economic activities. BUM Desa is a container of community economic activity. BUM Desa Gogik must be able to independently in accordance with the management of BUM Desa. BUM Gogik Village is expected to improve the economy of the village community. The purpose of this research is to know the empowerment of the community by the related parties through the development of BUM Desa in Gogik Village.

The focus of this research is the empowerment of the community by the related parties through the development of BUM Desa. Data collection methods used are: observation method, interview, and documentation. Techniques of data analysis using interactive data analysis that lasted until complete until the data is saturated.

The results showed that community empowerment conducted by related parties through the development of BUM Desa. 1) community empowerment through LKD conducted with entrepreneurship training and giving of capital to the community 2) Community empowerment through PAB is done with Mud Banyu activities and social activities of youth RT Gogik Village 3) community empowerment through Semarang Curug Tourism done by tree planting, net tourism activities and complete the facilities and tourism. Empowerment model can not be done maximally, monitoring and evaluation stage can not run well. Village BUM development is done with BUM Village management principles of cooperation, participative, emancipative, transparency, accountability and sustainability.

Supporting factors and obstacles of the local community through the development of BUM Desa. Supporting factors of community empowerment (1) high morale by the parties related to empowerment, and (2) adequate quality of human resources. Factors inhibiting the empowerment of the community (1) lack of awareness in the community to participate in developing BUM Desa, and (2) facilities and infrastructure BUM Desa inadequate.

Suggestion, there needs to be improvement of community empowerment program by looking at problem and requirement in society deeply. Conduct regular assistance and evaluation in the context of community empowerment.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
PRAKATA.....	vii
SARI.....	ix
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR BAGAN .....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	7
C. Tujuan penelitian .....	7
D. Manfaat penelitian.....	8
E. Batasan Istilah.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR	
A. Tinjauan Pustaka.....	10
B. Kajian Hasil-Hasil Penelitian yang Relevan .....	32
C. Kerangka Berfikir.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Latar Penelitian .....	37
B. Fokus Penelitian .....	38
C. Sumber Data .....	39

D. Tehnik dan Alat Pengambilan Data.....	40
E. Uji Validitas Data.....	42
F. Tehnik Analisis Data.....	43

#### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	
1. Gambaran Umum BUM Desa Gogik.....	46
2. Pe mberdayaan masyarakat melalui pengembangan BUM Desa di Desa Gogik.....	47
a Upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pihak-pihak terkait melalui pengembangan BUM Desa di Desa Gogik.....	64
b Faktor pendukung dan penghambat pihak-pihak terkait dalam melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan BUM Desa di Desa Gogik.....	75
B. Pembahasan .....	82

#### BAB V PENUTUP

A. Simpulan .....	92
B. Saran .....	93

DAFTAR PUSTAKA.....	94
---------------------	----



## DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Berfikir.....	36
Bagan 4.1 Struktur Organisasi BUM Desa Rejo Mulyo.....	48



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Interaksi Subsistem Desa.....	19
Gambar 2.2 Hirarki Kebutuhan Manusia menurut Maslow.....	27
Gambar 3.1 Model Analisis Data Interaktif.....	43
Gambar 4.1 Pelatihan pengelolaan BUM Desa dibalai PMD Yogyakarta....	60
Gambar 4.2 Evaluasi pengelolaan PAB.....	67
Gambar 4.3 tradisi makan bersama Mud Banyu.....	68
Gambar 4.4 Pembinaan Pipa Aliran Air.....	68
Gambar 4.5 Penanaman Pohon LMDH.....	73
Gambar 4.6 kegiatan bersih jalan wisata Curug Semarang.....	74



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Instrumen penelitian.....	95
Lampiran 2. Pedoman wawancara.....	104
Lampiran 3. Pedoman observasi.....	109
Lampiran 4. Hasil wawancara .....	110
Lampiran 5. Data informan .....	137
Lampiran 6. Surat rekomendasi penelitian .....	139
Lampiran 7. Surat keputusan dosen pembimbing.....	140
Lampiran 8. Foto dokumentasi.....	141





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Pemberdayaan merupakan langkah penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sejahtera berarti kecukupan secara lahir dan batin. Sejahtera secara lahir dapat diartikan bahwa seseorang berhak memperoleh kesempatan dan kemampuan untuk mendapatkan hak-hak dasar sebagai manusia, terpenuhinya kebutuhan pangan (makan), sandang (pakaian), papan (tempat tinggal), pendidikan, serta kesehatan. Sejahtera secara batin, seseorang memperoleh kebahagiaan, dihormati dan dihargai, bebas dari rasa takut, ancaman dan bebas mengemukakan pendapat dimuka umum (Widiastuti, 2015:37).

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses memberikan daya, kekuatan, dukungan serta dorongan motivasi kepada masyarakat agar dapat mengembangkan potensi yang dimiliki. Untuk itu, pemberdayaan penting dilakukan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dalam memperoleh haknya sebagai masyarakat. Suharto (dalam Widiastuti, 2015:39) berpendapat bahwa pemberdayaan pada intinya adalah memampukan seseorang menjadi lebih maju dan mandiri. Dalam arti lain, memampukan seseorang untuk menjadi sejahtera.

Dalam mewujudkan tujuan pemberdayaan, pemerintah memiliki peran penting untuk mendorong terwujudnya sebuah kesejahteraan. Salah satunya adalah dengan memberikan program-program yang mendukung kesejahteraan. Program Nawa Cita merupakan program unggulan pemerintahan Jokowi-JK pada

tahun 2014-2019 untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, sejahtera, dan bermartabat. Dalam program Nawa Cita, pemerintah memfokuskan pembangunan di sektor pedesaan.

Desa merupakan sebuah aset kekuatan besar bagi negara yang harus dikelolakembangkan untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam konsep Nawa Cita, desa menjadi prioritas utama dalam pembangunan, sesuai dengan isi Nawa Cita ke-tiga yang berbunyi: “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. Untuk itu, pemerintah memiliki peran penting untuk mendorong program pembangunan ditingkat desa, agar mampu mengelola potensinya secara mandiri. Salah satu program pembangunan desa adalah mendorong terbentuknya lembaga ekonomi yang berada ditingkat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

BUM Desa merupakan badan usaha yang dibentuk oleh pemerintah desa bersama masyarakat sesuai kesepakatan yang dibangun oleh masyarakat. Dasar pendirian BUM Desa ini, dilandasi oleh UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 371 ayat 2 dijelaskan Bahwa “Desa mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan mengenai desa”.

Salah satu kewenangan desa yang dijelaskan dalam UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa adalah dapat mendirikan badan usaha untuk mengelola potensi desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 87 dijelaskan bahwa:

1. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa.
2. BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
3. BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/ atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUM Desa merupakan badan usaha yang dibentuk pemerintah desa bersama masyarakat sebagai wadah untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, BUM Desa juga sebagai akses pelayanan publik untuk memperoleh informasi, serta permodalan dalam mengembangkan kreativitas dan keterampilan individu dalam masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan. Untuk itu, BUM Desa harus dikelolakembangkan dengan baik agar dapat berjalan sesuai fungsinya untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

Muh. Sayuti (2011:717-728) dalam penelitiannya yang berjudul: "Pelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sebagai Penggerak Potensi Ekonomi Desa dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Doggala" mengemukakan bahwa karakteristik BUM Desa sebagai institusi dalam pemberdayaan masyarakat harus berbadan hukum untuk menjadi pusat kegiatan

ekonomi masyarakat desa. BUM Desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, perlu adanya persiapan dalam pendirian BUM Desa, diantaranya pemerintah desa dan masyarakat bersepakat mendirikan BUM Desa, mendesain struktur organisasi, menyusun *job description*, menetapkan sistem koordinasi, menyusun bentuk aturan kerja sama dengan pihak ketiga, menyusun pedoman kerja organisasi BUM Desa, menyusun desain sistem informasi, menyusun rencana usaha, menyusun sistem administrasi dan pembukuan, melakukan proses rekrutmen, serta menetapkan sistem penggajian dan pengupahan.

Dalam pengembangan BUM Desa diperlukan sumberdaya manusia yang berkualitas untuk mengelolakembangkan BUM Desa. Sumberdaya manusia yang berkualitas dapat diperoleh dari jenjang pendidikan seseorang, pelatihan-pelatihan, kursus dan pendampingan dalam pengelolaan BUM Desa. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistika Kabupaten Semarang (2016) Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Semarang tahun 2010-2015 mencapai 71,87 yang dilihat dari aspek angka harapan hidup, pendidikan rata-rata, serta standar hidup masyarakat yang memperoleh peringkat ke-11 di Provinsi Jawa Tengah.

Indek Pembangunan Manusia Kabupaten Semarang tergolong baik dengan jumlah penduduk miskin pada tahun 2015 berjumlah 81.310 dari jumlah penduduk sebesar 1.000.992 juta jiwa, dengan angka partisipasi murni Sekolah Dasar 96,15 persen, angka partisipasi murni Sekolah Menengah Pertama 80,36

persen, angka partisipasi murni Sekolah Menengah Atas 49,67 persen, angka partisipasi murni Perguruan Tinggi 18,93 persen (BPS:2016). Tingginya Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Semarang seharusnya mampu memunculkan sumber daya manusia dalam mengembangkan BUM Desa.

Desa Gogik merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang. Desa Gogik merupakan salah satu desa yang memiliki BUM Desa yang berkembang di Kabupaten Semarang. BUM Desa Gogik ini, mengelola potensi desa melalui pembentukan beberapa unit usaha yang mengelola Pemanfaatan Air Bersih (PAB), Lembaga Keuangan Desa (LKD) serta pengelolaan wisata Curug Semarang. BUM Desa ini, merupakan salah satu aset desa yang dikelolakembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Gogik.

Desa Gogik memiliki jumlah penduduk sekitar 3563 jiwa (monografi desa, 2015). Terdapat 755 tidak/ belum sekolah, 165 tidak lulus SD, 1265 lulusan SD, 776 lulusan SMP, 514 lulusan SMA, 3 lulusan DI/II, 21 lulusan DIII, 42 lulusan S1, dan 2 lulusan S2. Masyarakat Desa Gogik memiliki sumber daya manusia yang baik terlihat dari jenjang pendidikan masyarakat Desa Gogik pada tingkat strata satu dan strata dua. Masyarakat Desa Gogik memiliki beragam profesi diantaranya; berprofesi sebagai petani, karyawan swasta, dan buruh harian lepas. Ada sekitar 242 jiwa berprofesi sebagai petani, 915 jiwa sebagai karyawan swasta, 284 jiwa sebagai buruh harian lepas, dan ada 729 jiwa belum/ tidak bekerja pada usia produktif antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun.

Tingginya angka belum atau tidak bekerja di Desa Gogik cukup besar, sehingga perlu adanya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kreativitas dan keterampilan masyarakat Desa Gogik untuk mendorong perekonomian serta membuka akses informasi tentang kesempatan dan lowongan kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran. BUM Desa Gogik merupakan Badan Usaha yang mengelola potensi desa. Potensi desa yang dikelola oleh BUM Desa Gogik yaitu: 1) Pemanfaatan Air Bersih, 2) Lembaga Keuangan Desa, dan 3) wisata Curug Semirang.

Pemanfaatan Air Bersih merupakan salah satu pemanfaatan sumber mata air untuk pemenuhan air bersih bagi masyarakat Desa Gogik dengan gratis sebagai salah satu wujud pemerataan kesejahteraan melalui air bersih bagi masyarakat. Lembaga Keuangan Desa merupakan unit usaha BUM Desa dalam bentuk koperasi simpan pinjam yang dimiliki masyarakat Desa Gogik untuk memenuhi permodalan masyarakat dalam mengembangkan atau merintis sebuah usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Wisata Curug Semirang merupakan wisata alam yang terdapat di Desa Gogik sebagai obyek wisata air untuk meningkatkan pendapatan asli desa.

Dalam pengelolaan potensi desa, BUM Desa harus dapat dikelola dengan baik dan dimaksimalkan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, diperlukan dorongan masyarakat Desa Gogik agar dalam mengelolakembangkan BUM Desa dapat dikelola secara mandiri, namun sulitnya mendapatkan dorongan dari masyarakat yang bersedia dengan sukarela untuk mengelola dan mengembangkan BUM Desa. Rendahnya pemahaman

masyarakat tentang pentingnya BUM Desa dalam peningkatan ekonomi masyarakat juga menjadi penghambat dalam pengembangan BUM Desa. Untuk itu, Pentingnya pemberdayaan masyarakat harus dilakukan pihak-pihak terkait untuk memunculkan sumberdaya manusia agar mampu dan bersedia untuk mengelola dan mengembangkan BUM Desa.

Untuk itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) DI DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG”.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Dari latar belakang diatas dapat didefinisikan masalah-masalah terkait dengan pemberdayaan masyarakat desa, diantaranya sebagai berikut.

1. Bagaimana pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait melalui pengembangan BUM Desa Gogik?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pihak-pihak terkait dalam melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan BUM Desa Gogik?

## **C. TUJUAN**

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan:

1. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pihak-pihak terkait melalui pengembangan BUM Desa Gogik;

2. Faktor pendukung dan penghambat pihak-pihak terkait dalam melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan BUM Desa Gogik.

#### **D. MANFAAT**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan kegunaan secara teoretis dan praktis.

1. Manfaat teoretis
  - a Menambah khasanah keilmuan dan kajian tentang pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan BUM Desa.
  - b Memberikan sumbangan pemikiran tentang model pemberdayaan melalui pengembangan BUM Desa.
2. Manfaat praktis
  - a Bagi Pemerintah, penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam mengatasi permasalahan pemberdayaan masyarakat.
  - b Bagi Desa, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk menambah literasi dalam pemberdayaan masyarakat.

#### **E. BATASAN ISTILAH**

1. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dalam penelitian ini adalah upaya yang dilakukan pihak-pihak terkait untuk memberikan daya dan kekuatan kepada masyarakat desa melalui pengembangan BUM Desa untuk mewujudkan masyarakat mandiri. Fokus pemberdayaan masyarakat dalam penelitian ini adalah



pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pihak-pihak terkait melalui pengembangan BUM Desa.

## 2. Masyarakat Desa

Masyarakat desa dalam penelitian ini adalah masyarakat yang masih tergolong rendah tingkat pendidikannya, masih mengandalkan potensi yang dimiliki alam, sebagian besar bekerja pada sektor pertanian, serta rendahnya keterampilan dan kreativitas yang dimiliki. Fokus masyarakat desa dalam penelitian ini adalah masyarakat yang tidak bekerja atau sedang menganggur karena minimnya keterampilan, kreativitas serta permodalan yang mereka miliki.

## 3. Pengembangan BUM Desa

Pengembangan BUM Desa dalam penelitian ini adalah pengembangan badan usaha dalam mengelola potensi desa. Potensi desa meliputi; Lembaga Keuangan Desa, Pemanfaatan Air Bersih, dan Wisata Curug Semirang. Fokus penelitian dalam pengembangan BUM Desa adalah pengembangan potensi desa melalui BUM Desa.

## 4. Pihak-pihak Terkait

Pihak-pihak terkait dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Gogik melalui pengembangan BUM Desa. Pihak-pihak terkait pemberdayaan Desa Gogik melalui pengembangan BUM Desa meliputi perangkat desa, pengelola BUM Desa, karang taruna, dan tokoh masyarakat. Fokus pihak-pihak terkait dalam penelitian ini adalah perangkat desa, pengelola BUM Desa, dan tokoh masyarakat.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. DESKRIPSI TEORETIS

##### 1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah terjemahan dari kata “*empowerment*”. Menurut Mernam Webster dan Oxford English Dictionary (dalam Adisasmito, 2014:151) kata *empower* mengandung dua pengertian, yaitu: 1) *to give power* atau *authority* atau memberi kekuasaan, mengalihkan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain, 2) *to give ability to* atau *enable* atau usaha untuk memberikan kemampuan. Dalam pengertian kedua kata tersebut, pemberdayaan diartikan memberi kemampuan atau keberdayaan kepada pihak lain yang tidak berdaya.

Kata *empowerment* berasal dari kata dasar *empower* yang berarti *to invest with power, especially legal power or official authority* atau *to equip or supply with an ability*. Jadi pemberdayaan diartikan menguasai, memberikan kuasa atau memberi wewenang sehingga menjadi obyek yang berkuasa. Dalam pemberdayaan terjadi proses yang mendorong dan meyakinkan masyarakat untuk memperoleh keterampilan, kemampuan dan kreativitas (Widanti, 2011:44).

Hulme dan Turner (dalam Adisasmito, 2014:152) berpendapat bahwa pemberdayaan mendorong terjadinya suatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yang tidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik secara lokal maupun nasional. Dari beberapa pengertian diatas dapat dirangkum bahwa pemberdayaan adalah memberikan kemampuan atau keberdayaan kepada masyarakat untuk memperoleh

keterampilan, kreativitas, kekuatan untuk mendorong suatu proses perubahan sosial kepada masyarakat yang tidak berdaya untuk memberikan pengaruh terhadap arena politik.

Dalam pengertian lain menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya menjadikan masyarakat berdaya dan mandiri, mampu berdiri diatas kakinya sendiri. Pemberdayaan masyarakat hakikatnya merubah perilaku masyarakat kearah yang lebih baik, sehingga kualitas dan kesejahteraan hidupnya secara bertahap dapat meningkat (Anwas, 2013:3).

Menurut Psoinos dan Smithson (dalam Greasley, 2004:354-368) pemberdayaan adalah sebuah persepsi dan keyakinan, sebuah posisi yang dimiliki oleh peneliti yang mengambil perspektif pengalaman pada arti pemberdayaan. Pemberdayaan merupakan sebuah pengalaman peneliti yang diyakini dapat memberikan daya dan kekuatan kepada masyarakat yang lemah dalam masyarakat untuk menimbulkan rasa percaya diri dan pengalaman masyarakat dalam mengatasi permasalahan.

Begitu juga Suparjan dan Hempri Suyatno (2003:44) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses yang tidak dapat diukur secara matematis, apalagi dengan sebuah batasan waktu dan dana. Indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat hanya dapat dilihat dengan adanya kesadaran masyarakat (*community awareness*). Diharapkan dengan adanya kesadaran komunitas ini dapat mengubah pemberdayaan yang bersifat penguasaan menjadi bentuk kemitraan serta mengeliminir terbentuknya solidaritas komunal semu pada masyarakat. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa

pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses memandirikan masyarakat dengan memberikan kemampuan, keterampilan dan kreativitas dalam masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat secara bertahap.

## **2. Pendekatan dalam Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat dikonsepsikan sebagai suatu usaha untuk memberikan kekuatan, tenaga, kemampuan, mempunyai akal atau cara untuk mengatasi masalah dalam kehidupan masyarakat (Adisasmito, 2014:149). Pemberdayaan dikonsepsikan dalam dua hal pokok, yaitu: 1) meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pelaksanaan berbagai kebijakan kemampuan yang diharapkan, dan 2) meningkatkan kemandirian masyarakat melalui pemberian wewenang secara proporsional kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk membangun diri dan lingkungan secara mandiri. Berdasarkan konsepsi pokok di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan pada dasarnya adalah memberikan wewenang kepada masyarakat agar mampu meningkatkan kemampuan masyarakat melalui berbagai kebijakan untuk mendorong masyarakat menuju kemandirian.

Dalam hal menentukan kebijakan pemberdayaan setidaknya dapat terwujud tiga kebijakan utama dalam mewujudkan kebijakan pembangunan nasional yaitu; 1) menetapkan suasana atau iklim untuk mengembangkan potensi yang dimiliki masyarakat, baik potensi yang dimiliki alam maupun manusia; 2) memperkuat potensi yang telah terbentuk dalam masyarakat dengan memberikan bantuan dana, pembangunan sarana dan prasarana, serta lembaga pengembangan pendanaan, penelitian dan pemasaran di daerah; dan 3) melindungi melalui

pemihakan kepada masyarakat yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang. Dalam ketiga kebijakan utama tersebut tentunya akan memperkuat posisi tawar masyarakat untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki serta mewujudkan masyarakat yang mandiri dan kuat berlandaskan kebijakan pembangunan.

### **3. Unsur-unsur Pemberdayaan Masyarakat**

Ada beberapa unsur pokok dalam pemberdayaan masyarakat, diantaranya:

1) aksesibilitas informasi; 2) keterlibatan dan partisipasi; 3) akuntabilitas; dan 4) kapasitas organisasi lokal (Adisasmito, 2014;154). Pertama, aksesibilitas informasi ini sangat penting dalam pemberdayaan masyarakat. Informasi disini sebagai kekuatan yang berkaitan dengan peluang, layanan, penegakan hukum, efektivitas negosiasi dan akuntabilitas sehingga akses dalam mendapatkan informasi sebagai unsur penting untuk mewujudkan masyarakat mandiri. Kedua keterlibatan dan partisipasi, dalam proses pemberdayaan keterlibatan dan partisipasi sangat penting untuk diperhatikan terkait dengan siapa yang dilibatkan dan bagaimana mereka terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan. Ketiga akuntabilitas, kaitannya dengan pertanggungjawaban publik atas segala kegiatan dengan mengatasnamakan rakyat. Terakhir adalah kapasitas organisasi lokal kaitannya dengan kemampuan bekerjasama, mengorganisasi masyarakat, serta memobilisasi sumberdaya untuk memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi.

Pemberdayaan masyarakat memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Seperti halnya, dalam mempengaruhi kebijakan yang berpengaruh pada lingkungan masyarakat, dapat mengatur urusan rumah

tangganya sendiri, dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi dalam melakukan kontrol atas permasalahan. Tolok ukur dalam pemberdayaan masyarakat adalah kemauan dan kemampuan anggota masyarakat untuk terlibat dalam proses pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat tidak membatasi keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam proses dan mekanisme pemberdayaan. Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam mempengaruhi kebijakan lokal (Adamson, 2013:199-202).

#### **4. Strategi Pemberdayaan masyarakat**

Dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat, dapat dilakukan beberapa strategi pemberdayaan, yaitu:

- a penguatan lembaga dan organisasi masyarakat,
- b mengembangkan kapasitas masyarakat,
- c mengembangkan sistem perlindungan sosial,
- d mengurangi berbagai bentuk pengaturan dalam masyarakat,
- e membuka ruang gerak seluas-luasnya bagi masyarakat, dan
- f mengembangkan potensi masyarakat (Adisasmito, 2014:155-156).

Salah satu langkah awal dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat adalah dengan mendukung posisi tawar dan akses masyarakat untuk memperoleh dan memanfaatkan input sumberdaya untuk meningkatkan kegiatan ekonomi melalui penguatan lembaga dan organisasi masyarakat. Langkah kedua yang diambil setelah penguatan lembaga dan organisasi masyarakat adalah dengan mengembangkan kapasitas masyarakat melalui peningkatan keterampilan dan pengetahuan, penyediaan sarana dan prasarana seperti modal, informasi pasar dan teknologi, sehingga dapat memperluas kerjasama dan mendirikan pendapatan yang layak, khususnya bagi keluarga yang kurang mampu dan masyarakat miskin.

Langkah ketiga setelah pengembangan kapasitas masyarakat adalah dengan mengembangkan sistem perlindungan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan seperti halnya masyarakat yang terkena musibah bencana alam dan masyarakat yang terkena dampak krisis ekonomi. Selanjutnya dengan mengurangi berbagai bentuk pengaturan yang menghambat masyarakat untuk membangun lembaga dan organisasi guna penyaluran pendapat, melakukan interaksi sosial untuk membangun kesepakatan antara kelompok masyarakat dengan organisasi sosial politik.

Setelah itu, dengan membuka ruang gerak seluas-luasnya bagi masyarakat untuk terlibat dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik melalui pengembangan forum lintas yang dibangun dan dimiliki masyarakat setempat. Terakhir dengan mengembangkan potensi masyarakat untuk membangun lembaga dan organisasi keswadayaan masyarakat ditingkal lokal untuk memperkuat solidaritas masyarakat dalam memecahkan berbagai masalah kemasyarakatan dan khususnya membantu masyarakat miskin dan rentan sosial. Dengan demikian diharapkan mampu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat untuk berkembang, mandiri, dengan meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat.

## **5. Model Pemberdayaan**

Model pemberdayaan tidak selamanya sama satu dengan yang lain. Dalam menganalisis model pemberdayaan harus memperhatikan permasalahan atau kebutuhan masyarakat, lokasi pemberdayaan serta kearifan lokal yang ada di daerah. Salah satu model pemberdayaan yang dikembangkan berbasis potensi

lokal oleh Astuti (dalam Widiastuti, dkk, 2015:44) meliputi beberapa tahap, diantaranya sebagai berikut: a) tahap persiapan atau tahap *look and think*, b) tahap *act*, dan c) monitoring dan evaluasi.

Tahap pertama atau tahap *look and think* meliputi persiapan secara administratif maupun persiapan lapangan penelitian. Secara administratif untuk mengetahui model yang cocok digunakan dalam lokasi penelitian dibutuhkan langkah awal penelitian meliputi rancangan serta tahapan penelitian, perijinan serta kontak awal dengan berbagai pihak yang terkait dalam penelitian. Untuk persiapan lokasi dibutuhkan *assesment* atau dugaan awal untuk memetakan kondisi subyek penelitian dan *Stakeholder* yang terlibat, kemudian dilakukan analisis kebutuhan potensi dan sistem sumber yang tersedia di lokasi penelitian.

Dari beberapa kegiatan tersebut akan diperoleh data subyek penelitian, serta dilakukan diskusi mengenai masalah, kebutuhan, dan rencana aksi yang akan dilakukan. Untuk memastikan kondisi sasaran penelitian dilakukan *home visit* untuk triangulasi dengan kondisi lapangan sehingga memperoleh informasi adanya sumberdaya lokal yang bisa dimanfaatkan.

Setelah tahap *look and think* yaitu melakukan bimbingan dan pendampingan. Bimbingan bisa berupa bimbingan usaha, bimbingan keterampilan dan pendampingan sosial oleh tim pendamping lokal dan proses sinkronisasi program antar instansi untuk mendukung percepatan ekonomi, melalui pengembangan teknologi agar dapat dimanfaatkan oleh kelompok sasaran. Kemudian tahap akhir masuk dalam evaluasi dan monitoring yang berupa diskusi kelompok di tingkat lokal.



Selain itu, juga ada model pemberdayaan menurut D. Geroy (1998: 57-65), ada beberapa strategi model pemberdayaan, diantaranya: 1) pembinaan atau mentoring, 2) modeling, dan 3) karir.

#### 1. Pembinaan atau mentoring

Pembinaan atau mentoring merupakan suatu proses yang direncanakan secara informal untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola potensi dengan mandiri. Tujuan adanya pembinaan adalah untuk meningkatkan keterampilan dan mengubah perilaku atau kebiasaan tidak baik dalam masyarakat dengan hal yang lebih efektif dengan pembelajaran. Dalam hal ini, Pembina harus memiliki jiwa kepedulian terhadap masyarakat dan menjunjung tinggi martabat dan saling menghargai. Pembinaan akan dapat berjalan dengan efektif, jika seorang pembina dapat memutus hirarki dan batas fungsional dalam masyarakat. Seperti halnya atasan dengan bawahan, sehingga masyarakat akan lebih adaptif terhadap perubahan.

#### 2. Modeling

Pemodelan perilaku merupakan studi tentang keunggulan pribadi kecenderungan meriru orang-orang yang dikagumi dan hormati. Pemodelan merupakan pelatihan berbasis keterampilan. Pemodelan biasanya menggunakan diskusi, demonstrasi, *role playing*, dan keterampilan yang dapat diajarkan. Pemodelan merupakan cara efektif untuk mengembangkan keterampilan dan mengubah perilaku individu. Pemodelan dapat dilakukan dengan menetapkan standar yang tinggi, memberikan contoh, menjelaskan nilai-nilai yang jelas dengan memberi contoh perilaku sesuai aturan, pada

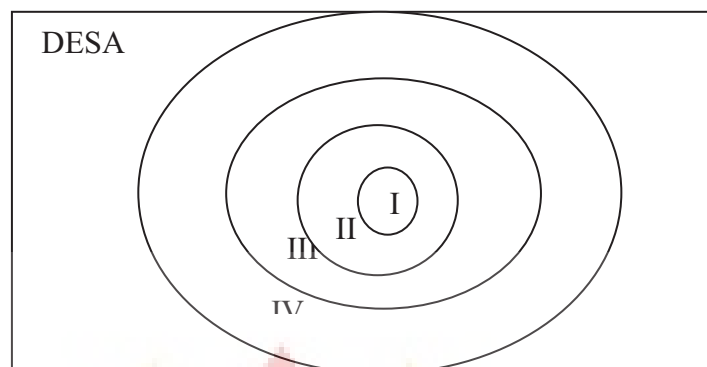
akhirnya akan membangun komitmen yang merupakan proses dari pemberdayaan.

### 3. Karir

Perencanaan perkembangan masyarakat untuk masa mendatang harus dipersiapkan sedini mungkin karena tuntutan zaman yang mengharuskan fleksibel dan memiliki beberapa keterampilan. Untuk itu, salah satu tahap penting dalam pemberdayaan adalah perekrutan. Seleksi yang tepat, penempatan dan pengasuhan di definisikan sebagai jalur karir yang akan dikembangkan. Dalam pengembangan karir dibutuhkan pengakuan prestasi, meningkatkan rasa tanggung jawab, dan menumbuhkan rasa komitmen supaya dapat mengembangkan keterampilan sesuai dengan yang diinginkan.

## 6. Pengembangan Desa

Penyeragaman pengaturan masyarakat desa justru menghambat kreativitas dan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kehidupan dan penghidupan secara mandiri, yang pada akhirnya akan membuat ketertinggalan desa dengan yang lainnya. Pertimbangan kesejahteraan dan adaptasi serta antisipasi berbagai tututan perkembangan dalam penyelenggaraan pemerintah, menjadi konsep dasar pengembangan desa kedepan. Jika dipandang dari sudut kesisteman wilayah pedesaan merupakan sebuah interaksi dinamis antara sistem yang secara struktural terdiri dari 4 subsistem yang menyusun desa (Wasistiono, 2007: 70). Keempat elemen tersebut adalah; kepemimpinan, kelembagaan pemerintah desa, sumberdaya sosial, serta lingkungan dan infrastruktur yang digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 *Interaksi Subsistem Desa*

(sumber: Wasistiono, 2007: 70)

Keterangan:

- I : Subsistem tata kepemimpinan menyangkut tata kepemimpinan
- II : Subsistem kelembagaan pemerintah desa menyangkut tata pemerintahan
- III : Subsistem sumberdaya sosial menyangkut tata kemasyarakatan
- IV : Subsistem lingkungan dan infrastruktur menyangkut tata ruang

Lebih jauh kapasitas masing-masing elemen sebagai subsistem yang saling berinteraksi dapat diuraikan dengan indikator sebagai berikut.

- a Kapasitas kepemimpinan, meliputi kapabilitas pemimpin, kematangan pengikut (masyarakat), situasi dan kondisi hubungan pemerintahan serta visi misi yang di emban.
- b Kapasitas kelembagaan pemerintah desa, meliputi: 1) Pemerintah desa terkait dengan kewenangan, organisasi, personil, keuangan, perlengkapan, perencanaan, pengawasan, dan dokumentasi; 2) BPD terkait fungsi agregasi dan artikulasi serta fungsi legislasi.
- c Kapasitas sumberdaya sosial meliputi: 1) SDM terkait dengan pendidikan, kesehatan dan daya beli; 2) sumberdaya sosial politik terkait dengan

partisipasi politik masyarakat, stabilitas keamanan dan ketertiban, dan eksistensi lembaga kemasyarakatan; 3) sumberdaya sosial ekonomi meliputi infrastruktur dan suprastruktur ekonomi pedesaan; 4) sumberdaya sosial budaya meliputi kesenian dan lembaga kesenian, adat dan lembaga adat; 5) sumberdaya sosial agama meliputi toleransi kehidupan beragama dan sarana ibadah.

- d Kapasitas lingkungan dan infrastruktur desa meliputi infrastruktur perdesaan, pemukiman, dan daya dukung lingkungan.

## **7. BUM Desa (Badan Usaha Milik Desa)**

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa (pusat kajian dinamika dan sistem pembangunan, 2007:4). Berdasarkan Permendes Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, bahwa BUM Desa didirikan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUM Desa harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Untuk itu, BUM Desa dimaksudkan agar keberadaan dan kinerjanya mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa.

Terdapat ciri-ciri utama yang membedakan BUM Desa dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

- a Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
- b Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);
- c Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*);
- d Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar;
- e Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*);
- f Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes;
- g Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota) (Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2007:4).

BUM Desa merupakan suatu lembaga ekonomi yang modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat yang menganut asas mandiri. Dalam Permendes Nomor 4 tahun 2015 tentang BUM Desa, modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa yang selanjutnya mendapat penyertaan modal desa dan modal masyarakat desa. Ada beberapa tujuan pendirian BUM Desa, diantaranya.

- a Meningkatkan perekonomian desa;
- b Meningkatkan pendapatan asli desa;
- c Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- d Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Pendirian BUM Desa merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainabel. Untuk itu, perlu upaya yang serius untuk pengelolaan BUM Desa agar mampu berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri.

Dalam Permendes Nomor 4 tahun 2015 tentang BUM Desa pasal 4 ayat 1 bahwa: "Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa". Selanjutnya dalam ayat 2 dijelaskan Desa dapat mendirikan BUM Desa dengan mempertimbangkan:

- a Inisiatif Pemerintah Desa dan/ atau masyarakat desa;
- b Potensi usaha ekonomi desa;
- c Sumberdaya alam di Desa;
- d Sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
- e Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang di serahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Keterlibatan pemerintah desa sebagai penyerta modal terbesar BUM Desa atau sebagai pendiri bersama masyarakat diharapkan mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan (proteksi) atas intervensi yang merugikan dari pihak ketiga (baik dari dalam maupun luar desa). Demikian pula, pemerintah desa ikut berperan dalam pembentukan BUM Desa sebagai badan hukum yang berpijak pada tata aturan perundangan yang berlaku, sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. BUM Desa juga merupakan perwujudan partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan, yang mana tidak menciptakan model usaha yang dihegemoni oleh kelompok tertentu di tingkat desa. Artinya, tata aturan dalam BUM Desa terwujud dalam mekanisme kelembagaan yang solid. Sehingga penguatan kapasitas kelembagaan akan terarah pada tata aturan yang mengikat seluruh anggota.

## 8. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Dalam Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007:10), prinsip umum pengelolaan BUM Desa sebagaimana seperti berikut:

- a Pengelolaan BUM Desa harus dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainabel, dengan mekanisme *member-basedan self help* yang dijalankan secara profesional dan mandiri. Berkenaan dengan hal itu, untuk membangun BUM Desa diperlukan informasi yang akurat dan tepat tentang karakteristik kelokalan, termasuk ciri sosial-budaya dan masyarakatnya serta peluang pasar dari produk (barang dan jasa) yang dihasilkan.
- b BUM Desa sebagai badan usaha yang dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri, harus mengutamakan perolehan modal yang berasal dari masyarakat dan pemerintah desa. meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUM Desa dapat memperoleh modal dari pihak luar, sesuai peraturan perundang-undangan yang lebih lanjut diatur oleh Peraturan Daerah.
- c BUM Desa didirikan dengan tujuan yang jelas. Tujuan tersebut, akan direalisasikan diantaranya dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama untuk kelompok miskin di pedesaan, mengurangi praktek ijon (*rente*) dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Hal penting lainnya adalah BUM Desa harus mampu mendidik masyarakat membiasakan menabung, dengan cara demikian akan dapat mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa secara mandiri.

- d Pengelolaan BUM Desa diprediksi akan tetap tetap melibatkan pihak ketiga yang tidak saja berdampak pada masyarakat desa itu sendiri, tetapi juga masyarakat dalam cakupan yang lebih luas (kabupaten). Oleh sebab itu, pendirian BUM Desa yang diinisiasi oleh masyarakat harus tetap mempertimbangkan keberadaan potensi ekonomi desa, dan kepatuhan masyarakat desa terhadap kewajiban yang menuntut keterlibatan pemerintah kabupaten.
- e Diprediksikan bahwa karakteristik masyarakat desa yang perlu mendapat pelayanan utama BUM Desa adalah (1) masyarakat desa yang dalam mencukupi kebutuhan hidupnya berupa pangan, sandang, dan papan yang sebagian besar memiliki mata pencarian disektor pertanian dan melakukan kegiatan usaha ekonomi yang bersifat usaha informal; (2) masyarakat desa yang penghasilannya tergolong sangat rendah, dan sulit menyisihkan sebagian penghasilannya untuk modal usaha selanjutnya; (3) masyarakat desa yang dalam hal tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri, sehingga banyak jatuh ke tangan pengusaha yang memiliki modal kuat; (4) masyarakat desa dalam kegiatan usahanya cenderung diperburuk oleh sistem pemasaran yang memberikan kesempatan kepada pemilik modal untuk dapat menekan harga, sehingga mereka cenderung memeras dan menikmati sebagian besar dari hasil kerja masyarakat desa. Atas dasar prediksi tersebut, maka karakter BUM Desa sesuai dengan ciri-ciri utamanya, prinsip yang mendasari, mekanisme dan sistem pengelolaanya.



Ada enam prinsip pengelolaan BUM Desa diantaranya kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, dan sustainabel yang dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Kooperatif, semua komponen di dalam BUM Desa harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- 2) Partisipatif, semua komponen yang terlibat dalam BUM Desa harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUM Desa.
- 3) Emansipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUM Desa harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku dan agama.
- 4) Transparan, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- 5) Akuntabel, seluruh kegiatan usaha dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.
- 6) Sustainabel, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUM Desa.

## **9. Pengembangan Sumberdaya Manusia**

Pembangunan suatu negara tidak lepas dengan namanya sumberdaya (*resources*), baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia. Kedua sumberdaya ini sangat penting dan berpengaruh dalam menentukan keberhasilan suatu pembangunan. Kualitas sumberdaya manusia menjadi aset penting dalam

pembangunan suatu negara. Banyak negara yang kaya akan sumberdaya alam akan tetapi kurang memperhatikan sumberdaya manusia, sehingga negara akan sulit untuk menjadi negara maju karena tidak dapat memaksimalkan pengelolaan sumberdaya yang dimiliki (Notoatmodjo, 1998:1).

Kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia sangat berpengaruh penting dalam pembangunan suatu negara. Kuantitas menyangkut jumlah sumberdaya manusia yang kurang berkontribusi dalam pembangunan suatu negara jika dibandingkan dengan kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya menyangkut mutu kemampuan manusia, baik kemampuan fisik (bekerja, berpikir, dan terampil) maupun kemampuan non fisik (kecerdasan dan mental).

Dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dapat diarahkan kedua aspek tersebut aspek fisik dan non fisik. Meningkatkan kualitas fisik dapat diupayakan melalui program-program kesehatan dan gizi, sedangkan dalam meningkatkan kualitas non fisik dapat dilakukan dengan upaya pendidikan dan pelatihan. Upaya inilah yang dimaksud dengan pengembangan sumberdaya manusia. Dalam Pengembangan sumberdaya masyarakat dapat digolongkan menjadi dua, pengembangan sumberdaya manusia secara makro dan pengembangan manusia secara mikro. Pengembangan manusia secara makro diartikan sebagai suatu proses peningkatan kualitas atau kemampuan manusia dalam rangka mencapai suatu tujuan pembangunan bangsa. Sedangkan secara mikro merupakan proses perencanaan pendidikan, pelatihan dan pengelolaan tenaga untuk mencapai hasil optimal.

Menurut Maslow dalam (Notoatmodjo, 1998:8) bahwa pengembangan sumberdaya manusia pada hakikatnya adalah upaya untuk merealisasikan kebutuhan. Maslow mengklarifikasikan kebutuhan manusia dalam tingkatan kebutuhan yang disebut hirarki kebutuhan manusia yang digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.2 *Hirarki Kebutuhan Manusia menurut Maslow*  
(sumber: Notoatmodjo, 1998:9)

Dalam lima hirarki kebutuhan tidaklah bersifat proses dalam arti kebutuhan kedua baru dapat diusahakan apabila kebutuhan pertama terpenuhi begitu juga kebutuhan ketiga baru diusahakan kalau kebutuhan kedua sudah terpenuhi dan begitu terus tetapi tidak diusahakan secara simultan. Dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan fisiologis, maka kebutuhan akan keamanan, kebutuhan sosial dan lainnya juga diusahakan untuk dipenuhi. Kebutuhan inilah yang menjadi dasar bahwa seseorang harus berkembang untuk mencukupi kebutuhannya.

## 10. Pendekatan dalam Pengembangan Masyarakat

Long, et al eds, 1973 (dalam Nasdian, 2015:62) ada beberapa pendekatan pengembangan yang pernah dilakukan diantaranya; Pendekatan Komunitas, Pendekatan Kemandirian Informasi, Pendekatan Pemecahan Masalah, Pendekatan Demonstrasi, Pendekatan Eksperimen, dan Pendekatan Konflik Kekuatan.

a Pendekatan Komunitas dalam pengembangan masyarakat, pendekatan ini memfokuskan pada partisipasi masyarakat dengan memperhatikan aspek lokalitas. Asumsi yang digunakan dalam pendekatan ini meliputi, 1) perhatian warga komunitas pada upaya-upaya perubahan; 2) keberhasilan pengembangan masyarakat berkorelasi dengan drajat atau peluang warga komunitas untuk berpartisipasi; 3) isu dan masalah ditingkat komunitas dapat dipecahkan berlandaskan kebutuhan pada warga komunitas; 4) pendekatan holistik adalah penting dalam pengembangan komunitas karena keterkaitan antar masalah dan isu-isu komunitas.

Tahapan yang dilakukan dalam pendekatan ini dimulai dengan proses diskusi ditingkat komunitas untuk mengidentifikasi masalah sekaligus membahas pemecahannya. Dalam hasil diskusi tersebut kemudian dijadikan sebagai masukan atau pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan, yang kemudian masyarakat diberi kewenangan untuk memilih alternatif yang terbaik dalam pemecahan masalah. Dengan demikian tahapan ini merupakan tahapan yang akan menunjukkan keberhasilan pengembangan masyarakat karena prinsipnya, komunitas sendirilah yang akan menentukan keberhasilan pengembangan.

b Pendekatan Kemandirian Informasi

Dalam pendekatan ini, peran serta partisipan tidak hanya karena dampak pendidikannya terhadap partisipan lainnya tetapi karena orang luar dengan pengetahuannya atau profesionalitasnya yang dipercaya dapat memberikan relevansi dan kredibilitas dalam pengembangan masyarakat. Dalam pendekatan ini, beragam informasi dimanfaatkan oleh partisipan yang berpengetahuan dalam kehidupan komunitas sehingga dapat menciptakan perbedaan arahan dan kualitas hidup.

Pendekatan ini menekankan pada pemahaman yang baik dari warga komunitas tentang prosedural isu-isu perkembangan masyarakat. Tahapan pendekatan kemandirian informasi dimulai dengan pencarian karakter, eksplorasi dimulai dengan suatu ekspresi oleh individu-individu atau kelompok tentang suatu kekhawatiran atau kekurangan dalam kehidupan bermasyarakat. Tahap selanjutnya pertanyaan-pertanyaan yang difokuskan dalam spekulasi dan cara yang bebas haruslah diseleksi dalam frase dan maksud yang dituju sejumlah orang yang terlibat tanpa menyudutkan masalah tersebut keposisi yang sulit.

Setelah tercapai persetujuan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang akan digunakan dapat diartikan bahwa penentuan prioritas antara masyarakat dan partisipan telah dihasilkan. Tahap selanjutnya terdiri dari perencanaan respon-respon yang sesuai untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Kemudian dari penilaian kolektif, masyarakat akan mendapat masukan dari masyarakat sendiri yang dirancang sesuai dengan situasi lokal atau responden mungkin

diambil dari pembelajaran dan pengalaman yang dapat dipublikasikan dari komunitas lainya.

c Pendekatan Pemecahan Masalah

Dalam pendekatan ini menekankan pada tiga elemen penting dalam pengembangan masyarakat, yakni: 1) kolektifitas masyarakat; 2) lokasi geografis; dan 3) pelebagaan yang memberikan identitas khusus pada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat adalah sistem sosial yang dipandang dari dalam kebudayaan yang memiliki sub sistem atau cabang kebudayaan yang fungsional dan disfungsional.

Tahapan dalam pendekatan ini, pertama identifikasi masalah, kemudian setelah masalah diidentifikasi, dipelajari dan dimengerti langkah berikutnya adalah menggerakkan sumberdaya yang diperlukan untuk mengaktifkan berbagai jenis kemampuan warga masyarakat. setelah itu tahap selanjutnya adalah perencanaan program pembangunan masyarakat dengan melihat faktor yang mempengaruhi masyarakat. langkah selanjutnya adalah memberi dukungan penuh kepada masyarakat dengan upaya menggerakkan kapasitas komunitas untuk melayani dan mendukung kegiatan pengembangan masyarakat.

Terahir tahap pemecahan masalah yang efektif dengan evaluasi, yang berarti tidak ada hal terahir yang tidak penting. Penilaian akhir dilakukan terhadap semua tahap untuk melaksanakan kegiatan yang akan dianalisis dengan kritis dalam hal kekuatan, kelemahan, kesuksesan, dan kegagalan.

#### d Pendekatan Demonstrasi

Dalam pendekatan ini, masyarakat dipahami sebagai sekumpulan (kelompok) orang yang memiliki kesamaan *interest* atau masalah, yang dibedakan menjadi komunitas pedesaan dan perkotaan, group publik, media massa, dan jalur atau saluran komunikasi. Tahapan yang dilakukan dalam pendekatan demonstrasi adalah dimulai dengan memperoleh fakta yang akurat sehingga dapat dipresentasikan.

Langkah selanjutnya adalah menerjemahkan gagasan-gagasan dalam demonstrasi ke dalam pertanyaan-pertanyaan atau masalah-masalah dalam masyarakat yang akan dikembangkan. Selain itu dibutuhkan masukan-masukan pada orang yang terlibat dalam kegiatan pengembangan.

#### e Pendekatan Eksperimen

Dalam pendekatan ini, masyarakat dicirikan sebagai kumpulan orang yang memiliki kepentingan bersama dalam bidang sosial, politik, ekonomi budaya dan geografi. Hal ini yang mengikat mereka sebagai entitas adalah kepentingan bersama. Pendekatan ini mengembangkan teori dan praktik dari pengalaman dan cara yang harmonis dengan sistem nilai para praktisi dilapangan.

Implementasi pendekatan eksperimen dalam pengembangan masyarakat menjadi terbatas karena tingginya resiko percobaan dalam pendekatan ini. Data harus dikumpulkan sesering mungkin dan umpan balik disediakan untuk menuntun kegiatan pengembangan masyarakat. Umpan balik akan memperkaya seluruh lapisan masyarakat dan meningkatkan praktik pengembangan masyarakat.

f Pendekatan Konflik Kekuasaan

Pendekatan konflik kekuasaan dalam pengembangan masyarakat memandang komunitas sebagai interaksi komponen yang kompleks antar komponen yang saling mempengaruhi dari sektor privat dan publik. Pada waktu dan situasi yang berbeda, pendekatan ini memiliki perbedaan kapasitas dalam kekuasaan. Asumsi yang digunakan dalam pendekatan ini adalah tindakan bentuk intervensi sosial dalam pengembangan komunitas berhubungan langsung kearah penciptaan konflik antara sub komunitas atau komponen dan pembuat keputusan pada komunitas yang lebih besar. Disamping itu peningkatan kekuatan sub komunitas akan menguntungkan tidak hanya sub komunitas tetapi juga pada komunitasnya.

**B. KAJIAN HASIL-HASIL PENELITIAN YANG RELEVAN**

1. Penelitian yang dilakukan oleh Supartini 2012 yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Potensi Desa Ketingen Kabupaten Sleman di Yogyakarta, memperoleh kesimpulan bahwa proses pemberdayaan yang dilakukan oleh LKMD Ketingen adalah dengan membentuk organisasi desa wisata. Dalam meningkatkan dan mengembangkan kegiatan warga, mereka membentuk kelompok-kelompok kecil seperti kelompok ternak kandang ngudi lestari, kelompok simpan simpan amanah rukun abadi, kelompok bakul kecil rumaket, kelompok usaha bersama amanah.

Faktor pendukung yang menunjang dalam pengembangan desa wisata ketingen antara lain: papan informasi dan peta wisata yang dapat memandu wisatawan, SDM yang banyak dan berkualitas, dan SDA yang indah dan



subur, serta potensi seni dan budaya. Faktor penghambat dalam pengembangan desa wisata ketenagakerjaan meliputi sumberdaya manusia sendiri, pendanaan dan kerukunan serta kepengurusan yang kurang maksimal.

Penelitian ini terdapat persamaan dalam metode yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan analisa data secara deduktif. Informan yang digunakan dalam penelitian ini memiliki beberapa kesamaan diantaranya tenaga pendamping desa, pengurus koperasi, lembaga sosial, tokoh masyarakat dan kelompok masyarakat.

Penelitian ini memiliki hubungan yang sama dalam pengembangan potensi desa, tetapi dalam penelitian ini, pengembangan potensi desa melalui Badan Usaha Milik Desa. Strategi pengembangan BUM Desa berupaya untuk mengelola dan mengembangkan potensi yang dikelola desa dengan tepat dan berdaya untuk mempertahankan keutuhan dan keaslian ekowisata pelestarian alam.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rakib dan Agus Syam 2016 yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat melalui Program *Life Skills* Berbasis Potensi Lokal untuk Meningkatkan Produktivitas Keluarga di Desa Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, memperoleh kesimpulan bahwa adanya program *life skills* dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam memproduksi ikan asin (kering) dan minyak kelapa fermentasi yang higienis dan berkualitas di desa Lero. Meningkatnya

kesadaran masyarakat nelayan dalam mewujudkan swadana dan swadaya dalam mengembangkan kelompok unit usaha kecil/ rumah tangga.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, memiliki kesamaan menggunakan metode kualitatif. Dalam pengumpulan data penelitian ini melalui angket, dan wawancara yang diolah dan dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Penelitian ini lebih menekankan pada pelaksanaan program *life skills* tujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat untuk mengembangkan potensi lokal.

Untuk itu, program *life skill*shanya difokuskan pada pengolahan ikan asin yang bervariasi rasa. Sedangkan dalam penelitian ini menekankan pada pemberdayaan untuk mengembangkan potensi desa melalui Badan Usaha Milik Desa.

### **C. KERANGKA BERFIKIR**

Pemberdayaan merupakan suatu proses memberikan daya dan kekuatan kepada masyarakat lemah (kurang mampu dalam hal ekonomi) untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dalam mewujudkan masyarakat mandiri. Melalui proses pemberdayaan, masyarakat diharapkan lebih mandiri, mampu berpikir, bertindak, dan bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukan. Disisi lain, pemberdayaan merupakan langkah penting suatu negara untuk mengembangkan potensi desa yang selama ini belum dimaksimalkan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Desa diharapkan mampu mengatur dan mengurus urusannya sendiri sesuai kebutuhan dan masalah yang ada dalam masyarakat.

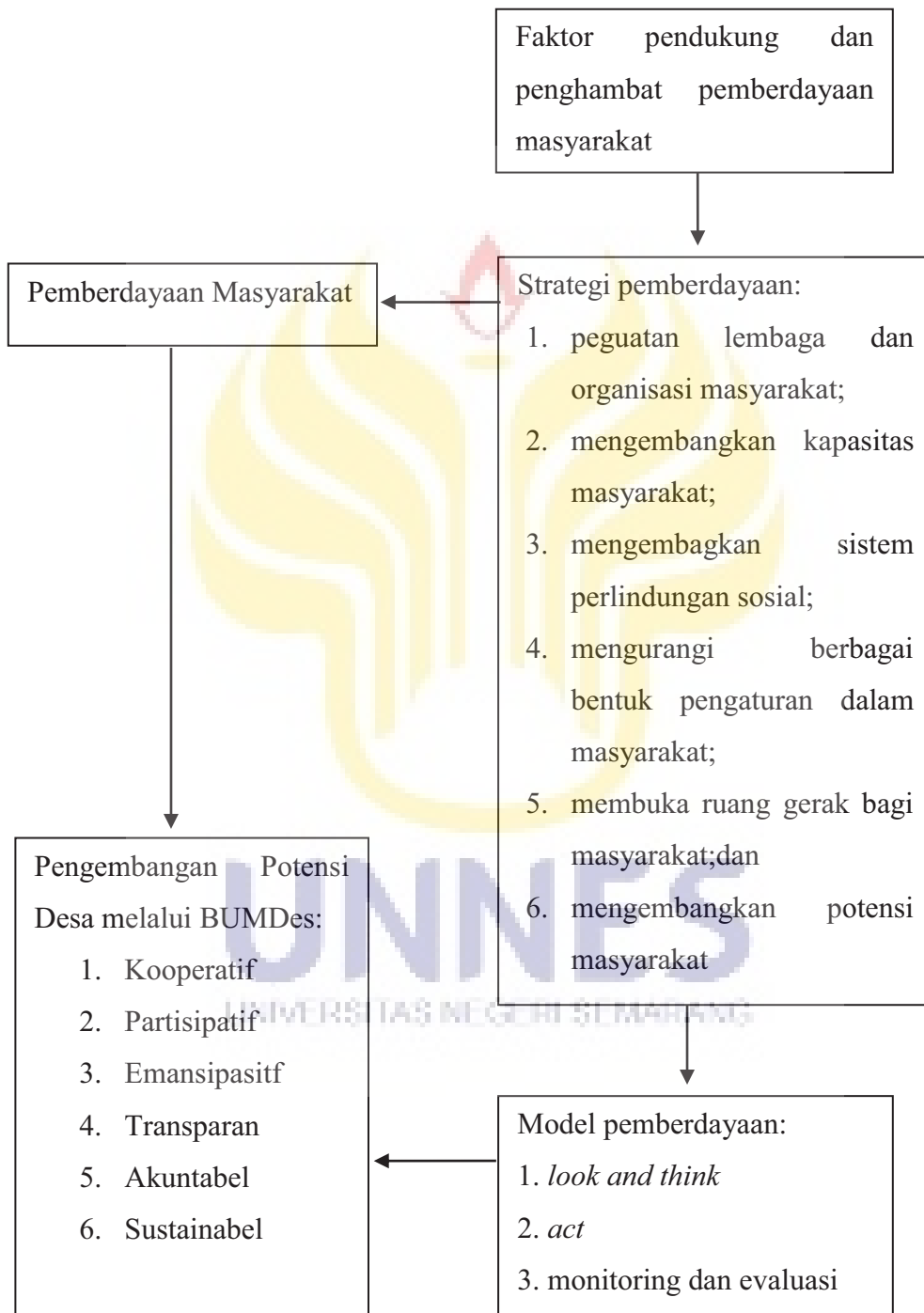
Pihak-pihak terkait pemberdayaan memiliki kewajiban untuk memberikan daya dan kekuatan pada masyarakat sebagai mana dijelaskan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa mengenai pemberdayaan. Dalam pemberdayaan diperlukan suatu pendekatan-pendekatan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pelaksanaan berbagai kebijakan yang mampu meningkatkan kemandirian masyarakat. Salah satunya dengan memberikan wewenang secara proporsional kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan, membangun diri, dan lingkungan secara mandiri.

Selain itu, dibutuhkan strategi dalam pemberdayaan untuk memberdayakan masyarakat. Strategi yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat meliputi: 1) penguatan lembaga dan organisasi masyarakat, 2) mengembangkan kapasitas masyarakat, 3) mengembangkan sistem perlindungan sosial, 4) mengurangi berbagai bentuk pengaturan dalam masyarakat, 5) membuka ruang gerak bagi masyarakat, dan 6) mengembangkan potensi masyarakat.

Strategi pemberdayaan ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana model pemberdayaan masyarakat, dengan memberikan keterampilan dan bekal yang cukup sehingga mampu mengembangkan potensi dirinya. sehingga Potensi desa yang dikelola BUM Desa dapat dikembangkan dengan baik untuk meningkatkan kemandirian masyarakat. Kerangka berpikir penelitian ini dalam pemberdayaan masyarakat melui pengembangan BUM Desa dapat digambarkan sebagai berikut.

Secara singkat kerangka berfikir dilihat pada bagan sebagai berikut.

Bagan 2.1 Kerangka Berfikir



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan BUM Desa di Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan BUM Desa Rejo Mulyo Desa Gogik dilakukan berbentuk pelatihan pengelolaan BUM Desa, pelatihan wirausaha serta bantuan modal bagi masyarakat. Beberapa aspek yang diberdayakan pihak-pihak terkait melalui pengembangan BUM Desa, pertama aspek kelembagaan dengan penguatan lembaga BUM Desa yang berbadan hukum, Aspek pengembangan kapasitas masyarakat dengan memberikan pelatihan wirausaha pembuatan sablon kepada masyarakat, aspek pengembangan sistem perlindungan sosial dilakukan dengan memberdayakan Satlinmas, dan Aspek pengurangan bentuk pengaturan di Desa Gogik dilakukan dengan kegiatan musyawarah desa dalam bentuk RAT. Dalam aspek mengembangkan potensi desa dilakukan dengan memberdayakan masyarakat untuk selalu peduli dengan alam.

Model pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan BUM Desa yang dilakukan kurang maksimal karena hanya memberikan pelatihan saja tanpa memperhatikan aspek lain. Dalam pengembangan BUM Desa di Desa Gogik pihak-pihak terkait sangat memperhatikan segi sosial ekonomi dalam masyarakat.

2. Faktor pendukung dan penghambat pihak-pihak terkait dalam melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan BUM Desa Gogik. Faktor pendukung pertama semangat juang pihak-pihak terkait dalam mengembangkan BUM Desa dan kedua kualitas SDM yang memadai yang dimiliki masyarakat Desa Gogik. Faktor penghambat pertama kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan dan sarana dan prasarana BUM Desa yang kurang memadai.

#### **B. Saran**

Berdasarkan simpulan hasil penelitian diatas maka saran yang disampaikan oleh penulis dalam pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan BUM Desa di Desa Gogik sebagai berikut:

1. Kepada pihak-pihak terkait Desa Gogik untuk lebih meningkatkan program-program pemberdayaan masyarakat dengan melihat model pemberdayaan. Sehingga kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak hanya dengan memberikan pelatihan saja melainkan sampai tahap monitoring dan pendampingan. Stakeholder juga harus meningkatkan pemodaln dalam masyarakat dengan merangkul UMKM yang ada dalam masyarakat Desa Gogik untuk bekerjasama mengembangkan BUM Desa.
2. Masyarakat Desa Gogik hendaknya juga ikut mendorong dan mendukung program-program BUM Desa dengan melibatkan diri dalam pengelolaan BUM Desa. Masyarakat juga harus dapat memanfaatkan dan memaksimalkan program-program yang diberikan unit usaha BUM Desa untuk mendorong kemajuan BUM Desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adamson, Dave. 2013. 'Community Empowerment: Learning from Practice ini Community regeneration'. Dalam *Jurnal of Public Sector Management*. No. 3. Hal. 190-202
- Adisasmito, Wiku. 2015. *Sistem Kesehatan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Anwas, Oos M. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Jakarta: ALFABETA
- BPS. 2016. *Kabupaten Semarang Dalam Angka 2016*. Semarang: Badan Pusat Statistika Kabupaten Semarang
- D. Geroy, Gery. 1998. 'Strategic Performance Empowerment Model. Dalam *Journal Empowerment in Organizations*'. No. 2. Hal. 57-65
- Greasley, Kay. 2004. 'Employee Perceptions of Empowerment'. Dalam *Journal Employee Relations*. No. 4. Hal. 354-368
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nasdian, Fredian Tonny. 2015. *Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Notatmodjo, Soekidjo. 1998. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Peraturan Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Nomer 2 Tahun 2014 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Rejo Mulyo
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
- Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan. 2007. *Buku Panduan Pendirian Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)*. Malang: Universitas Brawijaya
- Rachman, Maman. 2015. *5 Pendekatan Penelitian*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama

- Rakib, Muhammad dan Agus Syam. 2016. 'Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Life Skills Berbasis Potensi Lokal untuk Meningkatkan Produktivitas Keluarga di Desa Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang'. Dalam *Jurnal Administrasi Publik*. No. 1. Hal. 98-108
- Sayuti, Muhammad. 2011. 'Pelebagaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sebagai Penggerak Potensi Ekonomi Desa dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Donggala'. Dalam *Jurnal ACADEMIA FISIP*. No. 2. Hal. 717-728
- Sugiono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suparjan dan Hempri Suyatno. 2003. *Pengembangan Masyarakat Dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan*. Yogyakarta: Aditya media
- Supartini. 2012. 'Pemberdayaan Masyarakat melalui Potensi Desa Wisata Ketingen Kabupaten Sleman di Yogyakarta'. Dalam *Jurnal Nasional Pariwisata*. No. 1. Hal. 57-71
- Undang-undang Republik Indonesia Nomer 6 tahun 2014 tentang Desa
- Undang-undang Republik Indonesia Nomer 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Wasistiono, Sadu dan Irwan Tahrir. 2007. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: CV. Fokus Media
- Widanti, Ni Putu Tirka. 2011. *Model Kebijakan Pemberdayaan Perempuan di Bali*. Denpasar: Jagad Press
- Widiastuti, Siti Kurnia, dkk. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat Marginal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.